

WACANA

www.bernas.id

Anwar Sadat sang Reformis Perdamaian

Oleh: Brigida Intan Printina

Tidaklah berlebihan jika kecakapan dan kemahiran Sadat sebagai politisi menjadi contoh para elit politik negeri ini. Di tengah situasi Indonesia yang sarat akan profokasi dan krisis mental hingga mengakibatkan disintegrasi bangsa. Ada banyak faktor yang secara serta-merta menghambat reformasi bangsa setidaknya untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Beberapa hal yang dapat menghambat perdamaian justru datang dari permasalahan internal bangsa seperti adanya pemburu rente dalam birokrasi, adanya pihak oportunist yang selalu mencari kelemahan, bahkan berbagai paham dan golongan yang kontra Pancasila membuat perdamaian di negeri ini semakin jauh dari harapan.

Konsensus Politik Sadat

Kita disegarkan kembali pada peristiwa penting tepatnya pada tahun 1977, seorang prakarsa dengan penuh keberanian dan kebijakan politiknya berusaha menciptakan perdamaian antara Arab-Israel. Ia adalah Presiden ketiga Mesir, Anwar Sadat. Suatu prakarsa perdamaian yang dilakukan ialah kunjungannya ke Israel pada tanggal 19 hingga 21 November 1977 dan langkahnya dalam proses mempertahankan momentum perdamaian dalam konferensi Kairo hingga Pertemuan Puncak Begin-Sadat. Perdana Menteri Begin menerima secara positif langkah Sadat dalam upaya perdamaian. Dalam konferensi dan pertemuan tersebut Sadat memutuskan membentuk Komisi Politik dan Komisi Militer yang akan mengadakan perundingan-perundingan terperinci menuju perdamaian. Berkat prakarsa perdamaannya itu, Sadat oleh majalah Time dipilih sebagai "man of

the year" dan oleh berbagai pihak dicalonkan untuk hadiah Nobel bagi perdamaian. Rangkaian kejadian ini memberikan momentum tidak hanya bagi Arab-Israel yang bersitegang saat itu namun juga Mesir-Israel.

Rakyat Mesir menanggapi dengan penuh perhatian dan harapan besar terhadap langkah Sadat, karena misi perdamaian dapat membuka pihak yang bersitegang tidak hanya bagi rakyat Mesir namun juga dunia Arab. Dalam salah satu pidatonya, Sadat berseru kepada pemerintah dan rakyat Israel agar mengadakan perdamaian sejati dengan negara-negara Arab. Selanjutnya, dalam pidato yang terakhir di depan Majelis Rakyat Mesir pada 26 November 1977, Sadat mengundang semua pihak yang terlibat dalam sengketa termasuk Israel, untuk mengadakan perundingan-perundingan sebagai persiapan perdamaian dalam Konferensi Perdamaian Jenewa. Sadat ialah orang yang terbuka. Dalam berpolitik pun ia berusaha dengan matang memutuskan kebijakannya. Tak pernah ada ceriaan atau sindirannya di muka umum apa lagi terhadap lawan politiknya, alasannya ialah jabatan presiden adalah lambang yang tak patut direndahkan.

Merangkul Kekuatan

Di masa ini perdamaian seharusnya menjadi modal utama memajukan negeri ini. Kita dapat melihat bahwa bangsa dengan pelaksanaan demokrasi terhebat, mampu mendorong perekonomian negara hingga diakui dunia. Sesungguhnya per-

damaian negara telah diupayakan Soekarno dan kawan-kawan yang dengan segala kerelaan hatinya memperjuangkan ideologi Pancasila agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Gagasan dasar yang terkandung dalam ideologi bangsa telah disesuaikan dengan kondisi bangsa ini. Maka ideologi Pancasila dinilai telah memenuhi syarat bagi bangsa Indonesia yang pluralistik, sehingga mampu mengakomodasi keanekaragaman yang ada dalam kehidupan Indonesia baik di masa lalu, kini dan dimasa yang akan datang.

Perjuangan Sadat akan perdamaian juga dilakukan Gus Dur untuk membawa seluruh umat dengan agamanya sebagai instrumen religio-sosial dalam upaya menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah-tengah keberagaman beragama di Indonesia. Ia menekankan toleransi memang mengizinkan seseorang untuk menawarkan pandangannya kepada orang lain, namun dengan syarat tanpa ada paksaan untuk menerimanya. Toleransi pun memiliki batasnya yang tidak dapat menoleransi tindakan-tindakan yang intoleran. Gus Dur menjadi salah satu tokoh yang unik karena "memaksakan" perdamaian itu hadir di tengah manusia beragam di Indonesia tanpa menghadirkan sesuatu yang baru. Amanah konstitusi negara juga menegaskan hal yang sama.

Terkait perjuangan perdamaian, dalam sebuah pertemuan antara pemimpin negara di Internasional Convention Center Riyadh, di Arab

Saudi tahun ini, Presiden Jokowi mengemukakan 4 gagasan perdamaian khususnya dalam memerangi radikalisme dan terorisme. Pertama, seluruh umat di dunia harus bersatu memerangi terorisme dan tidak memicu disintegrasi untuk saling bermusuhan. Kedua, setiap negara mampu bekerjasama dalam pertukaran informasi intelejen, bahkan semua sumber pendanaan harus dihentikan di negara-negara yang mengalami radikalisme agar ideologi ekstrem dan radikal tidak semakin berkembang. Ketiga, setiap elemen berupaya menyelesaikan segala bentuk ketimpangan dan ketidakadilan sehingga pemberdayaan ekonomi yang inklusif dapat diperkuat. Keempat, setiap orang harus berani menjadi 'part of solution' bukan 'part of problem' dari upaya pemberantasan perpecahan bangsa sehingga dapat menjadi bagian dalam upaya penciptaan perdamaian dunia.

Dengan demikian sebuah kompromi politik kearah perdamaian akan tercipta apabila mampu menempatkan Pancasila sebagai kebutuhan akan perdamaian. Tanpa toleransi diantara masyarakat demokrasi tidak akan tercapai, tanpa memegang Pancasila maka perdamaian tak akan pernah terwujud. Presiden Sadat telah memberikan keteladanan akan perdamaian, seperti halnya perdamaian Indonesia haruslah merangkul keberagaman. Inilah yang ingin diperjuangkan para pemimpin negeri ini dimana pada akhirnya kita semua mampu membawa negara ke arah kemajuan.

Brigida Intan Printina, M.Pd.
Dosen FKIP Sejarah USD